

## Dalam Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Tak Ada Nama Ganjar

JAKARTA (IM) - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah membentuk tim pemenangan Pilkada 2024 dengan Adian Napitupulu sebagai ketuanya.

Tim ini tersusun atas ratusan anggota yang kepengurusannya ditetapkan lewat Surat Keputusan (SK) Nomor 942/KPTS/DPP/V/2024 yang diterima wartawan pada Minggu (26/5). Dalam struktur itu tidak ada nama mantan gubernur Jawa Tengah yang juga pernah menjadi calon presiden usungan PDI-P, Ganjar Pranowo tidak masuk di dalam struktur kepengurusan maupun tim pemenangan teritori wilayah.

Sedangkan sebagai pengarah adalah Megawati Soekarnoputri dan Hastu Kristiyanto. Jabatan ketua dipercayakan kepada Adian Napitupulu dan

Di Jawa Tengah, provinsi yang dipimpin Ganjar selama 2 periode, ada 10 kader yang ditugasi PDI-P mengisi tim pemenang teritori wilayah. Dari 10 nama tersebut tidak terdapat nama Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo sebelumnya mengaku akan berinisiatif membantu pemenangan kepala daerah dari PDI-P pada Pilkada Serentak 2024 walau tak mendapatkan penugasan khusus dari partai secara resmi.

"Secara khusus sih belum ya, tapi kalau saya enggak nunggu tugas. Kawan-kawan tadi, calon-calon bupati, wali kota, gubernur, tadi sudah ngobrol dengan saya," ujar Ganjar ditemui selepas pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5).

Ganjar menyampaikan, hal itu ia lakukan lantaran saat masa kampanye Pilpres 2024 lalu, para kader PDI-P itu juga bahu-membahu membantu pemenangannya.

"Tugas berikutnya saya sudah enggak usah disuruh harus ada kesadaran, tetap bantu kawan kita, gantian," kata Ganjar. ● mei

## Jaksa Agung Lakukan Mutasi, Kapuspenkum Dijabat Harli Siregar

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung ST Burhanuddin merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satu pejabat yang dimutasi ialah Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana.

Berdasarkan keterangan pers tertulis Kejagung, Minggu (26/5), mutasi jabatan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung Nomor 121 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. SK itu ditandatangani Burhanuddin teranggal 21 Mei 2024.

Dalam SK tersebut, Burhanuddin merotasi 78 pejabat eselon II. Harli Siregar ditunjuk sebagai Kapuspenkum Kejagung menggantikan Ketut Sumedana. Sementara Ketut diangkat sebagai Kajati Bali.

Dalam SK tersebut, ada pergantian posisi sejumlah Kajati, yakni Ponco Hartanto kini

ditunjuk sebagai Kajati Jawa Tengah, Ahelya Abustam sebagai Kajati DI Yogyakarta. Kemudian, Darmawel Aswar ditunjuk sebagai Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung.

Tak hanya itu, Jaksa Agung juga menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-523/C/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam SK tersebut, ada 328 pejabat eselon III yang dirotasi.

"Mutasi, rotasi, dan promosi di tubuh Kejaksaan adalah hal yang biasa sebagai bentuk penyesuaian dan pengisian jabatan yang kosong, sehingga akselerasi kinerja Kejaksaan akan lebih baik dan lebih adaptif ke depannya," ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana. ● han



FOTO: ANT

## KPU GUNUNGKIDUL MINTA ANGGOTA PPS PEGANG TEGUH KODE ETIK

Ketua KPU Gunungkidul Asih Nuryanti (berhijab, kanan) melakukan pelantikan 432 anggota PPS, di Wonorejo, Minggu (26/5). KPU Kab. Gunungkidul DIY, meminta 432 anggota panitia pemungutan suara (PPS) berpegang pada kode etik sebagai pegangan dalam menjalankan tugas pada Pilkada tahun 2024.

# 2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



## PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PILKADA DI PALU

Sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua KPU Kota Palu di Palu, Sulteng, Kamis (16/5). PPS berjumlah 135 orang mencakup 46 kelurahan di Kota Palu tersebut akan mulai bekerja per 26/5 untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak untuk pemilihan Gubernur dan Wagub Sulteng serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

# Pembentukan Kementerian Khusus Makan Bergizi Gratis Semakin Menguat

Program makan gratis bakal menemui sejumlah kendala, yakni mulai dari penyediaan bahan makanan sampai pendistribusian dan pengawasan.

JAKARTA (IM) - Program makan bergizi gratis adalah salah satu agenda prioritas yang digagas Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Program makan bergizi gratis diharapkan langsung bisa diwujudkan begitu pemerintahan Prabowo-Gibran efektif berjalan meski dalam pelaksanaannya, program ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, sempat mengungkapkan bahwa program yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta anak Indonesia ini membutuhkan anggaran sekitar Rp450 triliun.

Sedangkan berdasarkan hitung-hitungan TKN Prabowo-Gibran, kebutuhan ang-

garan tahap pertama untuk program makan bergizi gratis berada di kisaran Rp 100-Rp 120 triliun.

Program makan gratis ini dalam pelaksanaannya diperkirakan bakal menemui sejumlah kendala, yakni mulai dari penyediaan bahan makanan sampai pendistribusian dan pengawasannya di lapangan.

Prabowo pernah menyebutkan, setidaknya dibutuhkan impor 2,5 juta sapi untuk memuluskan program yang awalnya bernama makan siang dan susu gratis tersebut.

"Jadi, kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam dua tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu strategi kita," ujar Prabowo, dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Jakarta Pusat pada 4 Januari 2024 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada 17 Mei 2024, mengungkapkan, pemerintah akan fokus memenuhi kebutuhan pasokan dari produsen dalam negeri terkait kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis tersebut. Selain meningkatkan produksi dalam negeri, pemerintah juga berencana mempermudah pendaftaran produk susu dan turunannya.

Gibran beberapa waktu lalu mengemukakan urgensi soal pembentukan kementerian khusus yang bertanggung jawab akan program makan bergizi gratis. Soal kementerian khusus itu kembali diungkap presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja. Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya pada 24 Mei 2024.

Dengan dalih menghindari potensi kebocoran anggaran, Ketua Umum Partai

Gerindra ini menyebut, perlu ada kementerian atau badan yang dengan serius mengekskusi program tersebut.

Prabowo menekankan bahwa pembagian makanan bergizi dan susu gratis kepada anak-anak di Indonesia nantinya akan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan tipologi daerah masing-masing.

"Jadi, kita harus menyesuaikan rencana kita dengan tipologi dan kondisi daerah yang berbeda-beda. Kita jangan satu pola disamaratakan di Indonesia, ada daerah pegunungan, ada daerah pesisir, ada pulau. Jadi, kita harus selalu fleksibel, yang penting anak-anak kita dapat makanan bergizi. Saya kira itu tujuan kita," ujar Prabowo.

Dia memberi contoh salah satu daerah di Maluku

Barat Daya, yakni Pulau Moa yang kerap memproduksi air susu dari kerbau sehingga tidak sulit untuk mendapat produksi susu yang dapat dijangkau anak-anak di wilayah Moa. Namun, ada daerah lain akan sulit mendapatkan sumber susu sehingga akan difokuskan dengan pemerataan pembagian bahan pangan bergizi lain, misalnya ikan dan telur.

"Kalau lihat protein yang ada di susu, ternyata protein dan mineral dan zat-zat yang ada di telur itu lebih baik daripada susu. Para pakar cerita kepada saya dan telur kita jatuhnya bisa lebih murah bahwa di suatu daerah susu itu terlalu mahal ya kita konsentrasi kepada telur, kepada ikan, dan sebagainya," kata Prabowo. ● han

## PAN: Prabowo Bakal Pilih Orang yang Tepat untuk Menko Polhukam

JAKARTA (IM) - Salah seorang politisi PAN, partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran, menyerahkan soal susunan kabinet kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Terkait nama Yusril Ihza Mahendra yang diusulkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menjadi Menko Polhukam, tak masalah kalau memang itu pilihan Prabowo.

"PAN mengapresiasi semua usulan yang disampaikan. Namun, terkait sosok yang dibutuhkan dalam kabinet mendatang, semuanya diserahkan kepada Prabowo. Beliau yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun dan memilih anggota kabinetnya," kata Ketua DPP PAN, Salah Partaonan Daulay, kepada wartawan, Sabtu (25/5).

"Ini kan sifatnya usulan. Saya yakin, usulan ini sudah didengar. Paling tidak, ada satu opsi untuk mengisi pos kementerian dimaksud," imbuhnya.

Saleh yakinnya Prabowo mengetahui sosok yang tepat untuk mengisi kabinetnya, salah satu posisi Menko Polhukam. Terlebih, kata dia, bidang itu sangat dikuasai oleh Prabowo.

"Persoalan politik, hukum dan keamanan ini adalah bidangnya Prabowo. Saya yakin, beliau akan mencari sosok yang tepat. Bisa saja Yusril, atau bisa yang lain," ujarnya.

Dalam pemerintahan sebelumnya, kata Saleh, jabatan Menko Polhukam sering dijabat oleh sosok dengan latar belakang militer. Namun menurutnya, pada kabinet Prabowo nanti, tidak menutup kemungkinan jabatan itu akan diisi oleh seorang sipil.

"Nah, apakah Prabowo akan mempercayakan ke yang militer atau sipil, kita tunggu aja nanti. Secara umum, pembicaraan soal kabinet berjalan dengan baik. Pertemuan lintas ketua umum partai KIM berjalan dengan baik. Situasinya tenang dan tidak berisik," pungkasnya.

Usulan Yusril menjadi Menko Polhukam itu sebelumnya disampaikan oleh Pj Ketum PBB Fahri Bachmid. Fahri melihat jabatan tersebut

sesuai dengan kapasitas dan keilmuan Yusril.

"Ya, jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tempatnya di situ. Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya," kata Fahri kepada wartawan di kediamannya, Kamis (23/5/2024).

Fahri menilai Yusril harus mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari Jaksa Agung. Menurutnya, itu juga sejalan dengan keinginan Yusril untuk membangun sistem.

"Ya kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar kan. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi Jaksa Agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor," ucapnya.

Selain itu, Fahri menyebut Yusril juga terhalang aturan MK terkait Jaksa Agung harus terbebas dari partai politik selama 5 tahun. Menurutnya, itu yang juga menjadi kendala.

"Jadi memang sangat kelihatannya tidak terlalu cocok kalau Pak Yusril jadi Jaksa Agung. Dari segi perundang-undangannya tidak mendukung, ada batasan yang memang sudah diputuskan oleh MK. Dari aspek kapasitas Pak Yusril itu harus lebih kepada bagaimana membangun sistem tata negara. Yang paling cocok untuk nahkodai itu kan ada di menko. Supaya lebih holistik. Kira-kira gitu konsep pikirnya yang bisa terkecuali menjadi kebijakan negara dan didukung oleh perubahan-perubahan regulasi. Itu Prof Yusril cocoknya yang kayak gitu. Karena beliau sosok besar," jelasnya.

Meski demikian, Fahri membantah Yusril mundur demi mengejar jabatan Menko Polhukam. Menurutnya, Yusril mundur atas keinginan pribadi. ● han

## Air Mata Puan Menetes Saat Bacakan Poin ke-7 Sikap Politik PDI-Perjuangan

JAKARTA (IM) - Ketua Bidang Politik DPP PDI-P Puan Maharani sempat menitikkan air mata saat membacakan poin ketujuh sikap politik partai yang dihasilkan dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang digelar 24-26 Mei 2024.

"Rakernas V Partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD," kata Puan, yang disambut tepuk tangan ribuan kader PDI-P, Minggu (26/5).

Ganjar Pranowo yang duduk di kursi depan tampak terdiam. Puan lalu menyampaikan terima kasihnya pula karena PDI-P berhasil menjadi pemenang Pileg 2024.

"Dan PDI Perjuangan di-

percaya rakyat memenangkan Pemilu Legislatif tiga kali berturut-turut," kata Puan dengan suara bergetar.

Ganjar menyambutnya dengan tepuk tangan. Begitu pula dilakukan ribuan kader partai besutan Megawati Soekarnoputri itu. Ia kemudian sempat terdiam sesaat dan menitikkan air mata. Riuh tepuk tangan hadirin semakin keras.

"Semangat Mbak Puan!" seru salah satu peserta Rakernas V PDI-P.

Puan yang kini menjabat Ketua DPR RI tersebut lalu menyebut bahwa kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai, yakni struktural, legislatif, dan eksekutif.

Ia kembali tercekat dan tergetar suaranya sewaktu meminta maaf terkait perilaku

kader PDI-P yang menyimpang dari etika politik pada Pemilu 2024.

"Schubungan dengan adanya perilaku kader Partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi..." ucap Puan.

"Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Rakernas V Partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan Partai, agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali," ungkapnya. ● han



FOTO: ANT

## PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI BANTEN

Rohaniawan (kiri) mengangkat kitab suci saat acara pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Serang, Banten, Minggu (26/5). Sebanyak 201 orang anggota PPS resmi dilantik dan akan menjalankan tugas di 67 desa pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bulan November 2024.

**PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

PT Syaiendira Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi bermaksud melakukan penawaran umum REKSA DANA PT SYAIENDIRA CAPITAL ("REKSA DANA") dengan rincian sebagai berikut :

- REKSA DANA SYAIENDIRA BALANCED OPTIMA FUND yang telah memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-400/PM.02/2024 tanggal 22 April 2024.
- Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAIENDIRA BALANCED OPTIMA FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:
  - SYAIENDIRA BALANCED OPTIMA FUND Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
  - SYAIENDIRA BALANCED OPTIMA FUND Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan SYAIENDIRA BALANCED OPTIMA FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA dapat diperoleh di Kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

**SYAIENDIRA**

Jakarta, 27 Mei 2024  
Manajer Investasi  
PT SYAIENDIRA CAPITAL  
District 8, Treasury Tower, 39th Floor, Unit 39A  
Sudirman Central Business District Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (62-21) 2793 9900  
Faksimili : (62-21) 2793 1199

"INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENGERIMIKAN KINERJA MASA DATANG. PT SYAIENDIRA CAPITAL TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN"